

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|--------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Kompas |

Bantuan Kartu Jakarta Pintar Plus Cair Pekan Ini

JAKARTA, KOMPAS — Program bantuan sosial untuk pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tahap pertama tahun 2024 dipastikan cair pekan ini. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyeleksi ketat guna memastikan penerimanya adalah warga kurang mampu. Seleksi ketat berujung keterlambatan pencairan dana.

"Masyarakat calon penerima KJP Plus tidak usah khawatir karena saya pastikan bantuan cair minggu ini. Kami hanya ingin menjaga dan memastikan anggaran yang diperuntukkan bagi warga tak mampu ini tepat sasaran sehingga prinsip keadilan pada sektor pendidikan dapat kita wujudkan bersama-sama," ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin, Senin (10/6/2024).

Budi memastikan penerima KJP Plus adalah warga kurang mampu atau warga rentan yang benar-benar membutuhkan. "Bantuan ini distribusinya harus lebih selektif ke keluarga yang benar-benar membutuhkan dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari jenjang SD sampai SMA/ sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta, jika ter-

golong warga tidak mampu, berhak mendapatkan program ini," kata Budi.

Saat ini, pencairan KJP Plus akan dibagi menjadi beberapa tahapan. Pencairan KJP Plus tahap pertama tahun ini ialah Mei hingga Oktober 2024. Sementara untuk Januari hingga April 2024 sudah dicairkan. Pekan ini, menurut rencana, akan dicairkan bantuan untuk dua bulan terlebih dulu, yakni Mei dan Juni, dan seterusnya akan dicairkan secara bertahap.

Sebelumnya, banyak masyarakat penerima manfaat KJP Plus protes karena pencairan bantuan KJP Plus bulan Mei tak kunjung diterima. Padahal, bulan sudah berganti, tetapi saldo rekening belum bertambah.

Budi menjelaskan, distribusi pada tahap pertama 2024 terlambat karena perlu pemadanan dan verifikasi ulang. Penerima dipastikan agar warga Jakarta yang berdomisili di Jakarta. Program KJP Plus diberikan khusus kepada warga DKI Jakarta serta masuk pada program strategis dalam rangka memberikan akses wajib belajar 12 tahun kepada peserta didik usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu dan terdaftar pada DTKS.

Kemudian, penerima KJP Plus tidak memiliki kendaraan roda empat serta aset properti di atas Rp 1 miliar. Selain itu, dalam kartu keluarga tidak ada yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), TNI/Polri, anggota MPR/DPR/DPD/ DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota, atau pegawai tetap BUMN/ BUMD.

Nilai KJP Plus yang dibagikan berbeda di setiap tingkat pendidikan. Siswa SD atau sederajat akan menerima Rp 250.000 per bulan. Lalu, tambahan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk murid sekolah swasta Rp 130.000 per siswa per bulan dan akan dibekirkan selama enam bulan.

Kemudian, siswa sekolah menengah pertama atau sederajat akan menerima Rp 300.000 dan tambahan SPP siswa sekolah swasta Rp 170.000 per siswa per bulan. Sementara siswa sekolah menengah atas atau madrasah aliyah akan menerima Rp 420.000 dan tambahan SPP siswa sekolah swasta Rp 290.000.

Harus cepat

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mendorong agar Dinas Pendi-

dikan DKI mencairkan dana bantuan sesegera mungkin. Menurut dia, sesuai jadwal Dinas Pendidikan DKI, pendistribusian KJP Plus untuk peserta didik jenjang SD atau sederajat seharusnya telah dicairkan pada 22-25 April dan untuk siswa SMP atau sederajat pada 26 April hingga 6 Mei. Sementara siswa SMA atau madrasah aliyah biasanya pada 3-9 Mei 2024.

Ima mengaku banyak menerima keluhan dari orangtua peserta didik atas keterlambatan pencairan anggaran KJP. Apalagi, dana itu sangat penting untuk kebutuhan sekolah anak pada tahun ajaran baru.

Menurut Ima, tak elok jika ada pencairan anggaran yang tertunda karena berpotensi menghambat berbagai kebutuhan pendidikan meski ada alasannya. Sebab, para siswa perlu membeli buku, seragam, hingga biaya transportasi ke sekolah.

Ia mengingatkan pentingnya komunikasi transparan dan responsif dari pemerintah provinsi ke masyarakat terkait dengan penyaluran dana KJP. Sebab, masyarakat berhak mendapat info yang jelas mengenai kapan KJP dicairkan. (TIK)